BAB II

MASALAH PENDIDIKAN DI KALANGAN MASYARAKAT MISKIN

2.1 Kemiskinan

Menurut Mohammad Saroni (2009), menjelaskan kondisi seseorang dikategorikan miskin ketika mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bahkan mereka yang masih dapat memenuhi tetapi masih mengalami kesulitan dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin.



Gambar 2.1 Masyarakat tidak mampu.
Sumber : http://sarahtidaksendiri.files.wordpress.com/2008/10/miskin1.jpg



Gambar 2.2 Kondisi Pemukiman masyarakat kurang mampu.
Sumber : http://2.bp.blogspot.com/_zPx14ClEBWw/TKMTnh_-qSI/AAAAAAAAAOs/vjQJzZTtbKI/s1600/20090506miskin.jpg

Kemiskinan yang terjadi sekarang ini bukan lagi hal yang sulit dicari di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kota Bandung, ditambah dengan banyaknya pengangguran yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tersebut sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pemerintah berperan untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin, seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Pemerintah tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena masalah ini merupakan masalah yang harus diselesaikan bersama dimana masyarakat juga harus ikut bekerjasama untuk mengatasi kemiskinan, rasa kepedulian dan rasa saling membantu harus ditanamkan agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan haknya terutama dalam bidang pendidikan.

2.2 Pendidikan

2.2.1 Definisi Pendidikan

Pendidikan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan menurut Mohammad Saroni (2009), menjelaskan pendidikan adalah salah satu pemutus tali kemiskinan. Pendapat itu secara faktual telah lama dimengerti dan dikenal. Akan tetapi, warga negara di negeri ini belum sepenuhnya mengenyam pendidikan hingga jenjang yang paling tinggi.

Salah satu contohnya yang terjadi di Bandung, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan. Jangankan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk bersekolah saja mereka masih mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pun tidak terbagi secara merata, sehingga masih banyak dari anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah.

2.2.2 Dasar Hukum Pendidikan

Pendidikan mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, orang miskin juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan di negeri ini. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berdasarkan dasar hukum pendidikan tersebut, jelas bahwa orang miskin juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya.

Oleh karena itu, diperlukan kepedulian dan kerjasama untuk membantunya agar mendapatkan pendidikan yang layak tersebut.

2.3 Dampak Kemiskinan Terhadap Pendidikan

Pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun sebagai gerakan nasional. Dan masyarakat sangat mendukung mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran hingga batas yang diwajibkan tetapi, ketika harus berhadapan dengan masalah pendanaan, masyarakat mengalami kesulitan.

Program tersebut sangat menyentuh masyarakat, bahkan pada lapisan terbawah di masyarakat. Tetapi, program tersebut masih belum terlaksana sebagaimana mestinya sebab masih banyak orang miskin yang kesulitan mengikuti program tersebut. Kesulitan utamanya mengenai biaya pendidikan.

Kemiskinan merupakan faktor utama penyebab masyarakat merasa kesulitan dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, sehingga banyak anak-anak yang tidak sekolah bahkan putus sekolah. Realita tersebut dapat dilihat masih banyak anak-anak jalanan yang mengamen dan meminta-minta di setiap lampu merah atau perempatan jalan di

kota-kota besar seperti di Bandung. Karena kesulitan dalam faktor ekonomi tersebut, banyak orang tua yang justru memberdayakan anak-anaknya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Anak-anak yang sudah besar, bahkan yang masih kecil juga diajarkan secara langsung untuk mencari uang penutup kebutuhan hidup.



Gambar 2.3 Anak jalanan.
Sumber :
http://3.bp.blogspot.com/bl_rQR9YZXA/TWYCYAaSaxI/AAAAAAAAACQ/AZZFfSSl36M/s1600/anak-jalanan-jpg.gif



Gambar 2.4 Anak jalanan.
Sumber : http://aboxofmilk.files.wordpress.com/2010/08/bercengkrama-dgn-anak-jalanan1.jpg?w=600&h=399

Lebih tragisnya lagi tidak sedikit dari para orang tua tersebut yang memberdayakan anaknya dengan memerintahkan untuk menjadi pengemis atau pengamen di lampu merah atau persimpangan jalan. Mereka harus bertarung dengan kerasnya kehidupan dan ikut bertanggung jawab atas perekonomian keluarganya. Akibatnya, mereka pun kehilangan kesempatan untuk mengikuti proses pendidikan.

Beberapa contoh kasus menurut Denay Lesmana (2010) menjelaskan bahwa jumlah anak putus sekolah usia 7 hingga 15 tahun di Propinsi Jawa Barat tertinggi secara nasional karena orang tua siswa tidak mampu memenuhi kebutuhan pribadi siswa. Saat ini terdapat sebanyak 769.235 anak di Jawa Barat yang putus sekolah pada usia 7-15 tahun tersebut. Putus sekolahnya anak-anak di Jawa Barat itu disebabkan karena faktor kemiskinan, sehingga orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan pribadi siswa, seperti pembelian seragam sekolah dan buku tulis, kebutuhan pribadi siswa itu berada di luar program BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada harian Galamedia (2010) dijelaskan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Berdasarkan data terakhir Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

saat ini terdapat 13.685.324 siswa putus sekolah usia 7-15 tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 769.235 orang atau sekitar 6% berada di Jawa Barat. Komnas Perlindungan Anak mencatat, sejak tahun 2006 angka putus sekolah terus bertambah. Tahun 2006 tercatat 9,6 juta anak, saat ini naik menjadi 13,7 juta anak. Tentu saja angka ini mengkhawatirkan, apalagi data dari pusat menyebutkan pada akhir tahun 2009, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 14%. Sementara data terbaru untuk kwartal pertama tahun 2010, turun hingga 13,33%, namun tetap saja tinggi.

Dari beberapa contoh kasus dan data anak-anak putus sekolah yang setiap tahunnya terus bertambah, banyak dari anak-anak yang putus sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa seperti perlengkapan sekolah dan faktor kemiskinan itu sendiri.

2.4 Upaya-Upaya untuk Mengatasi Anak-Anak yang Putus Sekolah

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi anak yang putus sekolah, yaitu:

2.4.1 Upaya Pemerintah

Di dalam situs www.bappenas.go.id, pemerintah berupaya untuk mengatasi anak-anak yang putus sekolah yaitu dengan membuat program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lainnya agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Penerima Dana BOS

Dana BOS diutamakan bagi para siswa miskin, termasuk membantu siswa putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/ pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Jika kemudian hari masih ada sisa dana BOS, maka akan digunakan mensubsidi siswa lain. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa sehingga dapat mengurangi pungutan/ sumbangan/ iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi tamatan SD/MI setara yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB karena mahalnya biaya masuk sekolah.

Penggunaan Dana BOS di dalam situs www.bappenas.go.id

- Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
- Pembelian buku teks pelajaran (di luar buku yang telah dibeli dari dana BOS Buku) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya.
- Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- Pembelian bahan–bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan, koran, kopi, teh, dan gula untuk kebutuhan sehari–hari di sekolah.
- Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
- Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/ pondokan dan membeli peralatan ibadah.

Larangan BOS di dalam situs www.bappenas.go.id

- Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, study tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
- Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- Membangun gedung/ruangan baru.
- Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- Menanamkan saham.
- Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

Upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena masih banyak terdapat anak-anak yang putus sekolah. Hal ini disebabkan bantuannya tidak langsung diterima oleh masyarakat miskin dan putus sekolah, dan bantuan pun masih berupa potongan biaya

sekolah dan tidak berupa perlengkapan sekolah seperti seragam dan lainnya, seperti ketentuan yang telah dicantumkan di atas. Bantuan yang diberikan lebih fokus dengan kegiatan sekolah.

Terdapat banyak contoh kasus yang menyalahgunakan bantuan tersebut, yaitu oleh oknum tertentu sehingga bantuan tersebut tidak sampai kepada orang yang membutuhkan.

Menurut Global Post (2011), menjelaskan ternyata bantuan dana BOS untuk Kabupaten Bandung bukan hanya tahun 2010 yang bermasalah. Tetapi, pada tahun 2009 Polda Jawa Barat sudah menyelidiki dugaan korupsi dana BOS di Kabupaten Bandung.

Diungkapkan bahwa dalam kasus tersebut, penyidik dari Polda Jabar telah memintai keterangan sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, H. Juhana perihal penggunaan dana BOS yang diduga dipotong oleh oknum-oknum yang memanfaatkan dana BOS.

2.3.1 Upaya Masyarakat

Selain upaya dari pemerintah, ada juga beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi anak-anak yang putus sekolah, seperti mendirikan yayasan untuk anak jalanan, Dompet Dhuafa, dan Sekolah Rumah Mentari.

Di dalam situs resmi SRM (Sekolah Rumah Mentari) www.alifmagz.com (2010), Sekolah Rumah Mentari ini adalah sanggar atau komunitas yang berlokasi di kawasan Ciburial, Cimenyan, Bandung Utara. Sanggar ini merupakan salah satu yang peduli terhadap nasib anak-anak yang putus sekolah dan tidak sekolah. SRM ini dibentuk karena merasa tergugah oleh beberapa anak yang putus sekolah dari sebuah lembaga pendidikan yang dinaungi sebuah yayasan. Anak-anak tersebut dididik oleh beberapa mahasiswa dan alumni perguruan ternama di Bandung, seperti dari Institut Teknologi Bandung [ITB], Universitas Padjadjaran [Unpad], Universitas Pendidikan Indonesia [UPI] dan Universitas Islam Negeri [UIN] Sunan Gunung Djati, Bandung. Merekalah yang bersedia menjadi relawan pendidik di SRM.

Selain untuk anak-anak putus sekolah, Sekolah Rumah Mentari pun melayani pendidikan bagi anak-anak sekolah yang kurang mampu mendapatkan bimbingan belajar di luar sekolah. Tak heran, apabila menjelang Ujian Nasional [UN], anak-anak tersebut mendapatkan bimbingan belajar ekstra secara intensif. Sekolah Rumah Mentari berupaya untuk membantu anak-anak untuk persiapan UN kelas 3 SMP dan SMA.

Selain pelajaran sekolah umum, juga mengadakan bimbingan belajar keterampilan dan keahlian, misalnya elektronik, tata boga, dan keterampilan rajut. Sama seperti kegiatan belajar lainnya, waktu bimbingan ini diterapkan secara fleksibel. Sekolah Rumah Mentari juga memperhatikan anak putus sekolah, maka para relawannya menyiapkan juga program belajar persiapan paket belajar, yakni Paket A, B, dan C. Siapa saja bisa belajar di sini, relawan membagi jadwal belajar setiap minggunya yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu para relawan pendidik.



Gambar 2.5 Peserta didik SRM
Sumber: http://alifmagz.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/you_rummentari1_ed50.jpg



Gambar 2.6 Kegiatan belajar
Sumber: http://alifmagz.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/you_rummentari6_ed50.jpg

Keberadaan komunitas ini dapat mengurangi anak-anak yang putus sekolah. Kepedulian sosial seperti inilah yang sangat diharapkan oleh bangsa, saling membantu terhadap orang yang tidak mampu, bukan hanya memberikan bantuan berupa materi

tetapi juga memberikan bantuan berupa tenaga, ilmu, dorongan dan semangat agar anak-anak bisa terus tetap besekolah.

Ini merupakan program yang sangat diinginkan oleh masyarakat yang kekurangan karena rasa kepedulian yang tinggi dapat mengurangi anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah. Ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat dan berharap masih banyak lagi orang-orang yang akan mendirikan yayasan seperti ini agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata.

2.5 Studi Lapangan

Untuk menganalisis permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat, maka diadakan penelitian untuk memenuhi data primer dengan metode survey dengan keterangan sebagai berikut:

Tempat : Kabupaten Bandung (Wilayah Kopo)

Tanggal : 25 Desember 2010 –12 Januari 2011

Jumlah responden : 50 orang

Tempat yang dijadikan survey penelitian adalah daerah Kabupaten Bandung bertempat di wilayah Kopo, hal ini karena ada sebagian masyarakat yang perekonomiannya rendah dan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan serta masih terdapat anak-anak

yang putus sekolah. Responden yang ditentukan adalah orangtua yang status sosial ekonominya rendah, Responden berusia 22 – 63 tahun, karena rata-rata orangtua yang sudah mempunyai anak dan sudah bisa sekolah.

Dari hasil analisis data yang didapat peneliti, dapat disimpulkan permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat dari orang tua yang status ekonominya yang rendah berusia 22-63 tahun dengan latar belakang pendidikan SD sampai dengan SMA atau sederajat dan bertempat tinggal di daerah kabupaten Bandung tepatnya daerah Kopo, adalah sebagai berikut:

- Para orang tua masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan pemerintah karena persyaratan tertentu yang menyulitkan mereka, karena harus mengurus ke RT, RW bahkan sampai ke Kecamatan.
- Dari hasil *questioner* dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak merata, terbukti dengan masih adanya anak-anak mereka yang tidak sekolah dan putus sekolah karena tidak ada biaya.
- Responden sebagian besar masih banyak yang tempat tinggalnya masih mengontrak dan responden rata-rata memiliki banyak anak dengan status pekerjaan kebanyakan buruh yang berpenghasilan

kecil, hal ini menyebabkan responden mengalami kesulitan untuk membiayai atau menyekolahkan anaknya.

- Bantuan yang diberikan pemerintah hanya berupa potongan biaya sekolah seperti BP3 dan biaya kegiatan sekolah.

2.6 Solusi yang Ditawarkan

Mohammad Saroni (2009), menjelaskan bahwa:

Masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kepedulian terhadap kondisi pemerataan pendidikan pada setiap lapisan masyarakat. Bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan satu terhadap yang lainnya. Setiap yang terjadi pada masyarakat akan menimbulkan dampak pada orang lain. Sejak dulu masyarakat Indonesia telah menganut konsep hidup dalam kebersamaan sehingga banyak kegiatan hidup yang lakukan secara bersama-sama untuk mencapai hasil maksimal. Konsep hidup kebersamaan ini mengajarkan bahwa perlunya persatuan. Jika bersatu dalam melakukan suatu kegiatan, kegiatan tersebut dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan jika kegiatan tersebut dikerjakan secara individu. Konsep hidup kebersamaan ini diwujudkan dalam pola kegotong royongan dalam hidup. Masyarakat harus menerapkan konsep hidup

dalam kebersamaan pada proses pendidikan dan pembelajaran. Harus saling membantu agar program peningkatan sumber daya manusia melalui dunia pendidikan benar-benar dapat terwujud sebagai gerakan kesadaran bersama (h. 54).

Dalam konteks ini, gerakan kesadaran bersama yang dimaksudkan adalah adanya saling mendukung dan membantu antar sesama, khususnya orang-orang kaya terhadap orang miskin. Jika terjadi proses seperti ini, orang-orang miskin mempunyai kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang setara dengan para orang kaya. Dengan demikian, upaya peningkatan SDM dapat terwujud.

Dilihat dari hasil studi lapangan dan studi pustaka, banyaknya anak yang putus sekolah disebabkan oleh kekurangan biaya dan tidak adanya kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi siswa seperti kebutuhan perlengkapan sekolah, pemerintah telah membuat program dana BOS untuk mengurangi anak putus sekolah. Masyarakat juga ikut berupaya untuk mengurangi anak yang putus sekolah tersebut dengan mendirikan yayasan atau lembaga sosial.

Namun, upaya dari pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan yaitu dengan mengajak orang tua dengan status sosial ekonominya menengah ke atas untuk membantu anak-anak yang berada di sekitar mereka yang terancam putus sekolah, agar dapat memberikan bantuan dalam bentuk perlengkapan sekolah, karena perlengkapan sekolah menjadi salah satu penyebab anak-anak putus sekolah. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah bertambahnya anak-anak yang putus sekolah sekaligus mengajak dan mengajarkan kepada anak dari orang tua yang mampu untuk membantu sesama agar tumbuh jiwa kepedulian sosial pada diri anak tersebut.

2.7 Studi Target Audiens

a. Demografis

Gender : Laki-laki dan Perempuan

Usia: 25 tahun ke atas.

Umur sekitar 25 tahun ke atas merupakan umur rata-rata orang sudah berumah tangga dan mempunyai anak karena tujuannya agar mereka bisa mengajarkan kepada anaknya untuk berbuat baik dalam membantu sesama.

Status Sosial: Kalangan menengah ke atas

b. Geografis

Di daerah Kota Bandung

Karena di daerah perkotaan banyak terdapat orang-orang yang kehidupannya kalangan menengah ke atas agar tergugah dan dapat membantu anak-anak yang membutuhkan yang berada di sekitar mereka khususnya daerah Bandung.

c. Psikografis

Pada umumnya, orang tua sangat ingin memberikan hal yang terbaik untuk anaknya dan memberikan contoh teladan yang baik untuk anaknya. Orang tua senantiasa mengajarkan hal-hal yang positif kepada anaknya. Oleh karena itu, apabila orangtuanya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya dengan membantu orang-orang miskin yang membutuhkan, hal tersebut bisa menjadi contoh untuk mereka dan menjadikan anak-anak mereka mempunyai jiwa sosial yang tinggi di kemudian hari.